



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 734);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 – 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
10. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
16. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
17. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
18. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2

Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU dalam Peraturan Bupati ini merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024–2026;
- b. IKU yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024–2026, maka perhitungan data dimulai pada tahun penetapan Peraturan Bupati ini;
- c. IKU Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

IKU bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB III KEGUNAAN DAN KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN IKU Pasal 4

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

- b. Perencanaan Tahunan.
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

#### Pasal 5

Ketentuan umum penetapan IKU sebagai berikut :

- a. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator dampak (*impact*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. IKU pemerintah daerah paling sedikit memuat indikator dampak (*impact*); dan
  - 2. IKU perangkat daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan IKU juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
  - 1. Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana tugas pokok dan fungsi;
  - 2. Kebutuhan informasi kinerja penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

#### BAB IV

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 6

Ketentuan penetapan IKU perangkat daerah sebagai berikut :

- a. Setiap perangkat daerah wajib menetapkan IKU perangkat daerah;
- b. Penetapan IKU perangkat daerah mengacu pada IKU pemerintah daerah;
- c. IKU perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### BAB V

#### PENGUKURAN KINERJA IKU

#### Pasal 7

Ketentuan pengukuran kinerja IKU sebagai berikut :

- a. Pengukuran kinerja IKU wajib dilakukan oleh masing-masing entitas;
- b. Pengukuran kinerja IKU sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja;
- c. Pengukuran kinerja IKU dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

Pengukuran kinerja IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan; dan
- b. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 3 (tiga) tahunan yang direncanakan dalam RPD/Renstra perangkat daerah.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 9

Ketentuan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

- a. Pembinaan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 30 Januari 2024



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 30 Januari 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 779

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data	
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Persen	5,84	5,90	6,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan
			PDRB per Kapita	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Rupiah	57,2	58,5	59,2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan
	1.1 Meningkatkan daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan		LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Persen	2,36	2,37	2,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan

YJW

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Kecamatan Rawan Pangan	Jumlah kecamatan rentan pangan dibagi jumlah keseluruhan kecamatan di kabupaten dikali 100 persen	Persen	7,7	7,7	7,7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Persen	1,20	1,25	1,30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Katingan
		LPE Kategori Industri Pengolahan	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Persen	3,12	3,15	3,18	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan di akhir tahun (tahun n) dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun sebelumnya (tahun n-1) dibagi jumlah kunjungan wisatawan tahun sebelumnya (tahun n-1) dikali 100 persen	Persen	2,28	2,43	2,77	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan
		Persentase pertumbuhan nilai investasi	Nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun n-1 dibagi nilai investasi tahun n-1 dikali 100 persen	Persen	0,6	0,8	1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan

W  
 DL

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
						2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Angka	69,80	69,85	70,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Katingan Dalam Angka rilis BPS / rilis data KemenPPPA	Angka	85,80	86,00	86,20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan
	2.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Tahun	8,80	8,82	8,84	Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Tahun	12,99	13,01	13,02	Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan
			Angka Harapan Hidup (AHH)	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Tahun	67,16	67,51	68,02	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

*gth-k*

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prevalensi Stunting	Jumlah anak balita Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badannya atau tinggi badannya di bawah standar (berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak) Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak : Pendek : -3 SD s.d < -2 SD Sangat Pendek : < -3 SD	Persen	14	12	10	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
		Persentase penduduk miskin	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Persen	4,95	4,90	4,85	Dinas Sosial Kabupaten Katingan
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Katingan Dalam Angka rilis BPS	Persen	4,90	4,70	4,50	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan

Ygk  
K

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Katingan Dalam Angka rilis BPS / rilis data KemenPPPA	Angka	86,20	86,37	86,54	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan
3	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata	Indeks Infrastruktur	Koefisien persentase jalan dalam kondisi mantap dikali realisasi persentase jalan dalam kondisi mantap ditambah koefisien persentase rumah tangga berakses air minum layak dikali realisasi persentase rumah tangga berakses air minum layak dikali ditambah koefisien persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat dikali realisasi persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	29,54	30,23	30,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan

Handwritten signature or initials in blue ink.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data	
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten	Luas kecamatan yang terhubung poros kabupaten keseluruhan luas kecamatan dikali 100 persen	Persen	81,00	81,00	81,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
	3.1	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi "baik" + "sedang" dibagi jumlah keseluruhan panjang jalan kabupaten dikali 100 persen	Persen	40,33	45,54	48,03	Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan
			Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Jumlah jembatan kondisi "baik" + "sedang" dibagi jumlah keseluruhan jembatan kabupaten dikali 100 persen	Persen	75,31	77,78	80,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
			Persentase desa yang terlayani sektor transportasi	Jumlah desa yang sudah terlayani sektor transportasi dibagi jumlah keseluruhan desa dikali 100 persen	Persen	20	25	30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan

3176

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Jumlah rumah tangga yang telah mengakses air minum layak dibagi keseluruhan jumlah rumah tangga di kabupaten dikali 100 persen	Persen	34,57	34,69	34,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Jumlah rumah tangga yang telah mengakses sanitasi layak dibagi keseluruhan jumlah rumah tangga di kabupaten dikali 100 persen	Persen	34,78	36,02	37,26	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	Panjang jaringan irigasi kondisi "baik" + "sedang" dibagi jumlah keseluruhan panjang jaringan irigasi dikali 100 persen	Persen	43,17	46,05	49,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
		Persentase permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani dibagi jumlah keseluruhan permukiman kumuh di kabupaten dikali 100 persen	Persen	70	78	85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan

wh

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Terwujudnya kondusifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan)	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Penilaian Mandiri/Survey IKUB	Angka	77,07	77,12	77,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
		Persentase penyelesaian kasus SARA	Jumlah kasus SARA yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan kasus SARA yang terjadi atau dilaporkan dikali 100 persen	Persen	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan

416

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
						2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	4.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.	Persentase penurunan kasus kriminal	Jumlah kasus kriminal di tahun lalu (tahun n-1) dikurangi jumlah kasus kriminal di akhir tahun (tahun n) ] dibagi [ jumlah kasus kriminal di tahun lalu (tahun n-1) ] dikali 100 persen	Persen	50	50	50	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan
			Persentase penanganan kasus K3	Jumlah kasus K3 yang ditindaklanjuti atau ditangani dibagi jumlah keseluruhan kasus K3 yang dilaporkan atau terjadi dikali 100 persen	Persen	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan
			Persentase konflik sosial yang ditangani	Jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi jumlah keseluruhan konflik sosial yang terjadi atau dilaporkan dikali 100 persen	Persen	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
			Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi keseluruhan benda, situs, dan kawasan cagar budaya di kabupaten dikali 100 persen	Persen	60	73	100	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan

gls

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data	
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Kabupaten = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)	Poin	74,62	74,97	75.38	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
	5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	$\text{Nilai relatif} = \frac{E_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_j/L_{ij})^2}{2}}$ Maksimum $0 \leq PI_i \leq 1.0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1.0 < PI_i \leq 5.0 \rightarrow$ cemaran ringan $5.0 < PI_i \leq 10.0 \rightarrow$ cemaran sedang $PI_i > 10.0 \rightarrow$ cemaran berat	Poin	52.50	52.75	53.00	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
Indeks Kualitas Udara (IKU)			$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Poin	89.00	89.50	90.00	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan	
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			$IKTL = 100 - ((84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54.3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Poin	86.00	86.25	86.75	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan	
	5.2	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IRBI BNPB	Angka	144,40	143,40	142,40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan
6	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks RB	Penilaian Kemenpan RB	Predikat	B	B	BB	Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

Handwritten signature/initials in blue ink.

Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
						2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	6.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Penilaian Kemenpan RB	Predikat	B	BB	BB	Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
			Nilai LPPD	Penilaian Kemendagri terhadap LPPD	Kriteria	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
			Opini BPK	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Kabupaten Katingan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
			Nilai MCP	Penilaian MCP KPK	Poin	84	85	86	Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Inspektorat Kabupaten Katingan
	6.2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penilaian mandiri	Skor	85,00	85,50	86,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
			Indeks SPBE	Penilaian Kemenpan RB	Predikat Huruf	C	B	B	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan

sk

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target			Penanggung Jawab Sumber Data
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase desa berkembang	Jumlah Desa Kategori "Berkembang" dibagi Jumlah Keseluruhan desa dikali 100 persen	Persen	63	69	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan

KABUPATEN KATINGAN,  
  
SAEUL